



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**FGD Bidang Politik Dalam Negeri tentang
“UPAYA PENGUATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN”**

Jakarta, 21 Oktober 2019

“Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2018 menunjukkan bahwa tiga dari empat variabel pada Aspek Kebebasan Sipil memiliki capaian indeks dengan kategori BAIK, yaitu: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (82,35); Kebebasan Berkeyakinan (82,86); dan Kebebasan dari Diskriminasi (91,77). Hanya Variabel Kebebasan Berpendapat yang berada pada kategori SEDANG dalam capaian indek pada tahun 2018, yaitu 66,17. Namun pada sisi lain, capaian indek Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan (pada aspek Hak-hak Politik), berada pada kategori BURUK, yaitu hanya sebesar 54,28. Penyebab utama dari masih buruknya kinerja Partisipasi Politik masyarakat tersebut adalah, karena sebagian besar masih diekspresikan melalui *Demonstrasi/Mogok yang Bersifat Kekerasan*. Capaian skor indikator ini pada tahun 2018 hanya sebesar 30,37 (sangat BURUK). Sedangkan kekerasan tidak akan terjadi kalau fungsi DPR sebagai komunikasi politik berjalan. Kita bisa lihat bagaimana peran lembaga legislatif terhadap pembuatan regulasi yang dianggap tidak mengajak rakyat untuk terlibat dan ketika kualitas sebuah kebijakan dipertanyakan pemerintah tidak bisa memberikan alasan yang mendukung. Demonstrasi yang terjadi di mana-mana bisa membuktikan kalau memang ini bayaran yang mahal atas demokrasi itu sendiri yang tidak bisa terjadi jika DPR melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik.

Kendati secara prosedural, Indonesia telah cukup berhasil dalam menyelenggarakan pemilu, misalnya, tetapi vote yang telah dituai melalui pemilu tersebut sangat muskil menghasilkan *voice* pada pascapemilu karena lemahnya peran lembaga representatif. Dalam narasi yang lebih lugas, kecenderungan ini dapat dilabeli dengan terminologi *vote minus voice*. Data IDI 2018 cenderung mengonfirmasi kecenderungan ini. Misalnya, konsistennya capaian indeks variabel pemilu yang bebas dan adil dengan kategori baik (95,48) mengindikasikan bahwa secara prosedural Indonesia relatif telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang

demokratis sebagai sarana untuk menuai suara. Konsistennya capaian indeks variabel: *Hak Memilih dan Dipilih* pada kategori *Sedang* (75,77); dan *Pemilu yang Bebas dan Adil* dengan kategori baik (95,48), mengindikasikan bahwa secara prosedural Indonesia relatif telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebagai sarana untuk menuai *vote*.

Tetapi, pada sisi lain, fakta masih tetap buruknya capaian indeks variabel: *Peran DPRD* (58,92), mengisyaratkan bahwa sejatinya lembaga representatif masih lemah dalam menjalankan fungsinya, sehingga *vote* yang dihasilkan pada saat Pemilu tidak banyak terealisasi menjadi *voice* pada pasca Pemilu. Hal ini ditunjukkan oleh, antara lain, konsistennya capaian skor dengan kategori buruk pada indikator: *Perda Yang Berasal Dari Hak Inisiatif DPRD* (40,35); dan *Rekomendasi DPRD Kepada Eksekutif* (20,80). Lalu bagaimana melihat indikator keberhasilan DPR? Kurang adanya *check and balance* di pemerintah dengan tidak adanya kekuatan di oposisi. Kurang adanya fungsi pengawasan yang membuat sistem pemerintahan kita kelihatan berjalan hanya sesuai keputusan pemerintah. Pada konteks yang lebih luas, data IDI tersebut, secara implisit mengindikasikan bahwa reformasi politik yang berlangsung sejauh ini, baru sampai pada upaya menghadirkan Lembaga Demokrasi. Sementara, penguatan kapasitas yang semestinya dimiliki agar dapat menjalankan fungsi institusi, relatif kurang mendapat perhatian yang serius. Atau dengan kata lain, reformasi institusi demokrasi lebih ditujukan pada upaya membangun “Citra Demokrasi” (*Democratic Image*).”

(Prof. Dr. Syarif Hidayat)